Februari, 2025, Volume 7 Nomor 1
E-ISSN 2656-1026

POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU: STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI DAERAH MULTIKULTURAL

AT Prayer
Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas PGRI Palangka Raya
Email: atprayer88@gmail.com

Abstrak

Politik identitas telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam konteks pemilihan umum di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik identitas mempengaruhi dinamika pemilihan umum di daerah-daerah yang multikultural. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jurnal ini mengkaji beberapa kasus pemilihan umum di daerah yang memiliki komposisi masyarakat yang beragam, serta meneliti bagaimana identitas budaya, etnis, dan agama mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dipahami lebih dalam mengenai implikasi politik identitas terhadap stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia.

Keyword : Politik Identitas, Pemilihan Umum, Multikultural

Pendahuluan

Politik identitas telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam konteks pemilihan umum di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tutukansa, A. F. (2022). Dalam masyarakat yang multikultural, di mana berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan, politik identitas sering kali menjadi alat untuk mobilisasi massa. Soenjoto, W. P. P. (2019). Pemilu di daerah multikultural di Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan, menunjukkan bagaimana identitas etnis dan agama dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Syahrin, A. A., Noviani, F., Nur, I., & Idris, M. (2023). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku dan 700 bahasa, yang menciptakan keragaman yang kaya namun juga tantangan dalam membangun kesatuan nasional (BPS, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan politik identitas dalam kampanye pemilu telah menyebabkan polarisasi di masyarakat. Misalnya, pada Pemilu 2019, beberapa kandidat menggunakan simbol-simbol identitas etnis dan agama untuk menarik pemilih. Penelitian oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 62% responden merasa bahwa identitas etnis sangat mempengaruhi pilihan politik mereka (LSI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya sekadar isu sosial, tetapi juga memiliki dampak

signifikan terhadap dinamika pemilu dan hasilnya.

Lebih jauh lagi, fenomena ini juga terkait dengan sejarah politik Indonesia yang panjang, di mana identitas kelompok sering kali digunakan untuk menggalang dukungan. Khoirunnisa, K. (2023). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana politik identitas berfungsi dalam pemilu dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di daerah multikultural. Al-Farisi, L. S. (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika politik identitas dalam pemilu, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran politik identitas dalam pemilu di daerah multikultural di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, seperti: Bagaimana politik identitas mempengaruhi perilaku pemilih di daerah multikultural? Apa saja strategi yang digunakan oleh kandidat untuk memanfaatkan identitas kelompok? Dan bagaimana dampak dari politik identitas terhadap kohesi sosial di masyarakat?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika politik identitas dalam konteks pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan stakeholder terkait dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori politik identitas dan praktik pemilu yang lebih inklusif.

Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data akan dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dengan memadukan berbagai metode, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang politik identitas dalam pemilu di daerah multikultural. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi pada diskusi akademis tentang politik identitas di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika politik identitas dalam pemilihan umum di daerah multikultural. Andhika, W. (2023) Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana identitas sosial, etnis, dan budaya memengaruhi perilaku pemilih dan strategi kampanye politik. Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah yang dikenal dengan keragaman etnisnya, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Dengan menggunakan wawancara mendalam dan analisis dokumen, kami berusaha untuk menangkap nuansa dan kompleksitas yang ada dalam interaksi antara politik identitas dan pemilu.

Sampel penelitian terdiri dari 50 responden yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan sosial. Responden dipilih secara purposive untuk memastikan representasi yang adil dari berbagai kelompok identitas. Wawancara dilakukan dengan pemilih, calon legislatif, serta pengamat politik untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari hasil survei pemilih dan laporan pemilu sebelumnya untuk melengkapi analisis. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, yang menunjukkan pentingnya memahami konteks multikultural dalam politik.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari wawancara dan dokumen. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk menemukan hubungan antara identitas dan perilaku pemilih. Kami juga menggunakan triangulasi data untuk memastikan validitas hasil penelitian. Dengan membandingkan temuan dari wawancara dengan data sekunder, kami dapat mengonfirmasi atau menolak hipotesis awal mengenai pengaruh politik identitas terhadap pilihan pemilih.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Politik Identitas dalam Konteks Pemilu

Politik identitas merujuk pada cara di mana kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat menggunakan identitas mereka—seperti etnis, agama, atau budaya—untuk memengaruhi proses politik dan hasil pemilihan umum. Dalam konteks daerah multikultural, politik identitas sering kali menjadi faktor penentu dalam pemilihan umum, di mana kandidat atau partai politik berusaha menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan simbol-simbol identitas yang relevan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, Indonesia memiliki lebih dari 300 etnis yang berbeda, dengan lebih dari 700 bahasa yang digunakan di seluruh nusantara. Keberagaman ini menciptakan tantangan dan peluang dalam politik, terutama saat pemilu. Misalnya, dalam Pemilu 2019, banyak kandidat yang menekankan identitas etnis mereka untuk menarik suara dari komunitas tertentu. Hal ini terlihat jelas dalam kampanye di daerah seperti Papua dan Aceh, di mana identitas lokal sangat kuat dan menjadi daya tarik utama bagi pemilih (BPS, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% pemilih di daerah multikultural lebih cenderung memilih kandidat yang mereka anggap mewakili identitas mereka. Ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya relevan, tetapi juga sangat berpengaruh dalam menentukan hasil pemilu. Misalnya, di daerah seperti Jakarta yang memiliki populasi yang sangat beragam, pemilih cenderung memilih calon yang bisa merangkul semua kelompok etnis yang ada.

Politik identitas juga bisa memunculkan polarisasi di masyarakat. Ketika identitas etnis atau agama menjadi fokus utama dalam kampanye, hal ini dapat memicu konflik antar kelompok. Misalnya, selama Pemilu 2014, terdapat ketegangan yang signifikan antara kelompok pendukung calon presiden yang berbeda, yang berujung pada kekerasan di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun politik identitas bisa menjadi alat untuk mobilisasi, ia juga memiliki potensi untuk menciptakan perpecahan.

Penting untuk memahami bagaimana politik identitas dapat dikelola untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat multikultural. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan inklusif yang mengakui dan menghargai keberagaman dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan stabilitas politik. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dalam politik harus mempertimbangkan cara untuk memanfaatkan identitas tanpa mengorbankan kohesi sosial.

B. Dampak Politik Identitas terhadap Partisipasi Pemilih

Dampak politik identitas terhadap partisipasi pemilih di daerah multikultural sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kandidat berhasil menjalin hubungan emosional dengan pemilih melalui identitas, tingkat partisipasi pemilih cenderung meningkat. Misalnya, dalam Pemilu 2019, daerah-daerah dengan kandidat yang memiliki latar belakang

etnis yang sama dengan mayoritas pemilih mengalami peningkatan partisipasi hingga 15% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (KPU, 2019).

Data dari survei yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa di daerah dengan populasi multikultural, seperti Bali dan Maluku, pemilih lebih aktif ketika mereka merasa identitas mereka diwakili. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran pemilih yang mencapai 82% di Bali, dibandingkan dengan 75% di daerah yang lebih homogen (KPU, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa representasi identitas dalam politik sangat penting untuk mendorong partisipasi.

Tantangan yang muncul akibat politik identitas. Dalam beberapa kasus, kelompok minoritas merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam proses politik. Misalnya, di daerah yang didominasi oleh satu etnis, kelompok etnis lainnya sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses kekuasaan politik. Hal ini dapat menyebabkan apatisme dan menurunnya partisipasi pemilih dari kelompok tersebut.

Selain itu, politik identitas dapat menciptakan kesenjangan dalam akses informasi dan pendidikan politik. Di daerah-daerah yang memiliki keragaman tinggi, pemilih dari kelompok minoritas sering kali kurang terinformasi tentang calon-calon yang ada, yang berujung pada rendahnya partisipasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemilu dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik yang inklusif, agar semua kelompok merasa terlibat dan memiliki suara.

Meningkatkan partisipasi pemilih di daerah multikultural memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada identitas, tetapi juga pada isu-isu yang lebih luas yang mempengaruhi semua kelompok. Dengan menciptakan platform yang memungkinkan dialog antar kelompok, diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan partisipasi secara keseluruhan dalam pemilu (Widianto, 2022).

C. Studi Kasus: Pemilu di Jakarta sebagai Contoh

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, merupakan contoh yang menarik untuk menganalisis politik identitas dalam pemilu. Dengan populasi yang sangat beragam, Jakarta menjadi arena di mana politik identitas sangat terlihat. Dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, misalnya, identitas etnis dan agama menjadi isu sentral yang mempengaruhi pemilih. Calon gubernur Anies Baswedan, yang berasal dari latar belakang Muslim, berhasil menarik dukungan yang signifikan dari pemilih Muslim, sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan seorang Tionghoa dan Kristen, menghadapi tantangan besar dalam hal ini.

Data dari survei menunjukkan bahwa pemilih Muslim di Jakarta lebih cenderung memilih Anies karena faktor identitas, yang menciptakan polarisasi di antara pemilih. Hasil pemilu menunjukkan bahwa Anies berhasil meraih 57% suara, sementara Ahok hanya mendapatkan 43% suara. Ini menunjukkan bagaimana identitas dapat menjadi faktor penentu dalam hasil pemilu, terutama di daerah yang multikultural seperti Jakarta (KPU, 2017).

Pemilu di Jakarta juga menunjukkan bahwa politik identitas dapat berujung pada konflik. Selama kampanye, terdapat banyak insiden yang melibatkan ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap Ahok, yang akhirnya berujung pada kasus hukum yang mengakibatkan penjara bagi Ahok. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh identitas dalam politik di Jakarta, dan bagaimana hal tersebut dapat memicu ketegangan sosial.

Selain itu, kasus Jakarta juga menunjukkan pentingnya peran media dalam membentuk opini publik terkait politik identitas. Media sering kali memperkuat narasi yang berkaitan dengan identitas, yang dapat mempengaruhi cara pemilih membuat keputusan. Dalam konteks ini, media memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi yang berimbang dan tidak memicu polarisasi lebih lanjut.

Dengan demikian, studi kasus Jakarta memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana politik identitas beroperasi dalam pemilu di daerah multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun politik identitas bisa menjadi alat yang efektif untuk mobilisasi, ia juga memiliki potensi untuk menciptakan konflik dan perpecahan dalam masyarakat.

D. Strategi untuk Mengelola Politik Identitas dalam Pemilu

Mengelola politik identitas dalam pemilu di daerah multikultural memerlukan strategi yang komprehensif dan inklusif. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan memperkuat dialog antar kelompok. Dengan menciptakan ruang bagi semua kelompok untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain, diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara kelompok yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan program dialog antar komunitas cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah

Selain itu, pendidikan politik yang inklusif juga sangat penting. Lembaga pemilu dan organisasi masyarakat sipil harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang calon-calon dan isu-isu politik yang relevan. Dengan meningkatkan literasi politik di kalangan semua kelompok, diharapkan dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dan mengurangi ketidakpuasan yang mungkin muncul akibat ketidakpahaman.

Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah dengan mendorong kandidat untuk mengadopsi platform yang lebih inklusif. Kandidat yang mampu merangkul semua identitas dan mengedepankan isu-isu yang relevan bagi berbagai kelompok akan lebih mungkin untuk mendapatkan dukungan yang luas. Dalam hal ini, partai politik juga perlu berperan aktif dalam menciptakan kandidat yang mencerminkan keberagaman masyarakat.

Berkaitan dengan itu, penting juga untuk mengawasi dan mengatur penggunaan media sosial selama kampanye. Media sosial sering kali menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat terhadap konten yang berpotensi memicu konflik perlu diterapkan untuk menjaga stabilitas sosial selama pemilu.

Akhirnya, perlunya kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi politik identitas yang sehat. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, diharapkan pemilu di daerah multikultural dapat berlangsung dengan damai dan adil, serta mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat.

Kesimpulan

Politik identitas memainkan peran yang sangat penting dalam pemilu di daerah multikultural. Identitas etnis, agama, dan budaya tidak hanya mempengaruhi partisipasi pemilih, tetapi juga dapat menciptakan polarisasi dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk mengelola politik identitas dengan cara yang inklusif dan konstruktif.

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah perlunya dialog antar kelompok yang lebih intensif, pendidikan politik yang inklusif, dan pengawasan terhadap media sosial untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain itu, kandidat dan partai politik harus merangkul keberagaman dan mengedepankan isu-isu yang relevan bagi semua kelompok.

Referensi

Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya pengaruh kompleks politik identitas di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, *14*(1).

Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milineal indonesia di era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, *4*(2), 187-217.

Syahrin, A. A., Noviani, F., Nur, I., & Idris, M. (2023). Kerukunan Masyarakat Multikultural Pasca Kontestasi Politik Identitas Saat Pilkada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018. *Harmoni*, *22*(1), 117-142.

Khoirunnisa, K. (2023). Pemilu Dan Politik Identitas: Dilema Antara Kebangsaan Dan Keagamaan. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, *9*(1), 36-54.

Al-Farisi, L. S. (2020). Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila. *Aspirasi*, *10*(2), 77-90.

Andhika, W. (2023). Dinamika Identitas Nasional Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Politik. *literacy notes*, *1*(2).